

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas, 2004).

Untuk saat ini konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah konsep ekonomi, dimana kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar versi BPS ini sejalan dalam buku *“The End of Poverty”* (Sachs, 2005) yang menjelaskan bentuk kemiskinan ini sebagai *“the extreme poverty”*. Menurut Sachs, bentuk kemiskinan dalam konteks ini merupakan ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga, atau

sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik itu dalam soal pangan maupun non pangan.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi (Yacoub, 2012). Menurut Chambers (dalam Nanga, 2006) kemiskinan adalah masalah ketidakberdayaan, keterisolasian, kerentanan, dan kelemahan fisik, dimana satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi.

Menurut Sukirno (2011) jumlah penduduk yang besar dalam pembangunan suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong karena, pertama, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua, perluasan pasar, hal ini disebabkan antara lain karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas dan akan terdapat banyak pengangguran.

Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual. Pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar

akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Menurut Sukirno (2000), pengangguran akan membuat pendapatan masyarakat berkurang, dan dengan begitu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang tercapai. Semakin rendahnya tingkat kemakmuran akan muncul masalah lain yaitu kemiskinan. Seringkali masalah kemiskinan timbul bersama dengan masalah pengangguran. Kedua masalah ini erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah. Jika disederhanakan, apabila seseorang miskin maka tidak dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Rendahnya pendidikan seseorang membuat dirinya terbatas untuk mencari lapangan kerja yang diinginkan. Menurut Arsyad (2010), ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part-time*) selalu berada di antara kelompok masyarakat yang miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk di antara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.

Menurut Tambunan (2011) pertumbuhan angkatan kerja yang semakin cepat dan pertumbuhan lapangan yang agak lambat menyebabkan masalah

pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara atau daerah, dengan begitu pengangguran akan mempengaruhi kemiskinan dengan banyak cara. Menurut Sukirno (2012), dampak buruk dari pengangguran ialah mengurangi pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai masyarakat.

Ukuran kinerja perekonomian dalam suatu daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Bruto. Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil menurut Sukirno (2000). PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Sasana, 2006). Jadi semakin rendah PDRB suatu daerah, maka semakin kecil pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Adapun kualitas manusia dapat diukur melalui IPM. Menurut Mulyadi (2003) bahwa peningkatan kualitas manusia dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan, yaitu pembangunan pendidikan juga akan

memperhatikan arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang, pembangunan kesehatan harus mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, untuk penduduk miskin peningkatan kualitasnya dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis.

Menurut Ginting (2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang dijadikan acuan untuk program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur menjadi *pilot project* atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh kekurangan pendapatan dan modal (*lack of income and asset*), tetapi juga kurangnya akses terhadap infrastruktur (*lack of access to infrastructure*), baik ekonomi maupun sosial. Infrastruktur ekonomi meliputi semua prasarana umum seperti tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pembuangan limbah, sedangkan infrastruktur sosial meliputi perumahan, kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemicu pertumbuhan

ekonomi, memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi, dan mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah, serta memberi efek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Tabel 1.1

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Jawa Timur



Penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur masih cukup banyak dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pada Tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.572,73 ribu jiwa (11,40 persen), berkurang sebesar 13,24 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang sebesar 4.585,97 ribu jiwa (11,46 persen). Persentase penduduk miskin pada tahun 2021, menurun 0,06 persen poin terhadap tahun 2020. Pada wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin meningkat 0,01 persen poin, dari 8,37 persen pada tahun 2020 menjadi 8,38 persen pada tahun 2021. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2020 sebesar 15,16 persen, turun menjadi 15,05 persen pada tahun 2021 (menurun 0,11 persen poin).

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang ingin di berikan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

1.5 Kesenjangan Penelitian

Permasalahan terkait tingkat kemiskinan yang tinggi dihadapi hampir oleh semua negara di dunia. Bukan masalah berapa banyak atau berapa besar jumlah orang miskin, namun mengenai cara bagaimana untuk menekan tingkat kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diyakini sebagai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sodik dan Istiqomah (2019) menemukan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan tidak langsung.

Kesempatan kerja dengan sempurna menengahi efek pertumbuhan ekonomi pada kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat mengurangi kemiskinan ketika pertumbuhan mampu meningkatkan kesempatan kerja.

Rapika Kesatriani Damanik , Selna Aprilia Sidauruk (2020) dalam penelitian “Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Utara” menemukan, variabel jumlah penduduk dan variabel PDRB secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang yang menjelaskan tentang fenomena saat ini yang sedang terjadi di masyarakat yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, tujuan dilakukan penelitian ini, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, kesenjangan dari penelitian ini, serta sistematika penyusunan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penjelasan dari teori-teori yang yang digunakan peneliti untuk mendasari penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontingensi.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model, dan pengujian hipotesis serta diakhiri dengan pembahasan.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, batasan-batasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.